

## ABSTRAK

### ANALISIS PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN THE CITIZENSHIP AMENDMENT ACT TERHADAP IMIGRAN MUSLIM BANGLADESH DAN PAKISTAN DI ASSAM INDIA

Oleh

Thea Mutiara

Pemerintah India merevisi Undang-undang kewarganegaraan tahun 1955 dan mengubah persyaratan untuk mendapatkan hak kewarganegaraan yang melalui proses naturalisasi dengan memberikan kemudahan yaitu, orang-orang Negara Bangladesh dan Pakistan yang menganut lima agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah India yaitu, Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi atau Kristen, kecuali Muslim. Amandemen ini dianggap menggunakan “agama” sebagai standar tunggal yang ditetapkan untuk menentukan hak kewarganegaraan. Sehubungan dengan kemenangan Bharatiya Janata Party, dan Perdana Menteri India Narendra Modi, menerapkan visi “*Hindu Rashtra*” (negara Hindu) melalui penerapan undang-undang diskriminatif ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Undang-undang kewarganegaraan India dan Proses pengambilan keputusan Pemerintah India terkait *The Citizenship Amendment Act* terhadap Imigran Muslim Bangladesh dan Pakistan di Assam India. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan konsep Decision Making untuk menganalisa aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan Pemerintah India terkait *The Citizenship Amendment Act*.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan ada beberapa aspek yang berperan dalam pengambilan keputusan yaitu faktor lingkungan kebijakan, faktor psikologis, dan faktor internasional. Dari penelitian ini, Faktor psikologis menjadi hal yang paling mempengaruhi proses pengambilan kebijakan *The Citizenship Amendment Act* tercermin dari Analisis idiosinkratik Narendra Modi yang sangat kuat dengan Hinduisme yang selaras dengan tujuan Pemerintah, untuk menjadikan India sebagai “*Hindu Rashtra*” atau (negara Hindu) serta gaya kepemimpinan Narendra Modi yang dikenal dengan *autocratic leadership* nya.

---

**Kata Kunci :** *The Citizenship Amendment Act*, Assam, Imigran, Pemerintah India, Muslim, Bangladesh, Pakistan.

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF THE POLICY-MAKING PROCESS OF THE CITIZENSHIP AMENDMENT ACT ON BANGLADESHI AND PAKISTAN MUSLIM IMMIGRANTS IN ASSAM INDIA***

**By**

**Thea Mutiara**

The Government of India revised the 1955 Citizenship Act and amended the requirements for citizenship rights through the naturalization process by making it easier for Bangladeshi and Pakistani nationals who adhere to the five religions defined by the Indian government: Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian, except Muslims. This amendment was seen as using “religion” as the sole standard set for determining citizenship rights. In light of the victory of the Bharatiya Janata Party, and India's Prime Minister Narendra Modi, implementing a vision of “*Hindu Rashtra*” (Hindu state) through the implementation of this discriminatory law. This research aims to describe the impact of the Citizenship Amendment Act 2019 on Bangladeshi and Pakistani Muslim Immigrants in Assam India. This research uses a qualitative approach. The use of the concept of Decision Making to analyze the basis for the formation of the 2019 Citizenship Amendment Act policy and the Concept of Discrimination to explain the impact that the 2019 Citizenship Amendment Act policy has on Bangladeshi and Pakistani Muslim Immigrants in Assam India. The results of this study indicate that psychological factors are the most instrumental in making the 2019 Citizenship Amendment Act policy. The psychological factor being the most influential thing in the policy-making process of The Citizenship Amendment Act 2019 is reflected in Narendra Modi's idiosyncratic analysis which is very strong with Hinduism which is in line with the Government's goal, to make India a "Hindu Rashtra" or (Hindu state) and his autocratic leadership style.

---

**Keywords :The Citizenship Amendment Act, Assam, Discrimination, Immigrants, Government of India, Muslims, Bangladesh, Pakistan.**